



# Tinjauan Perizinan Pertambangan di Indonesia

Kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mempunyai peranan yang penting dalam memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sebelum terbitnya UU Minerba No 4 Tahun 2009, pengusaha pertambangan Minerba menggunakan skema kontrak antara pemerintah dengan perusahaan yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK). Pemerintah Indonesia telah mengatur bentuk perusahaan pertambangan sektor Minerba melalui skema perizinan yang diatur di dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan UU No 3 Tahun 2020, usaha pertambangan terbagi menjadi 9 jenis izin, yaitu 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP); 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); 3) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, 4) Izin Pertambangan Rakyat (IPR), 5) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), 6) Izin Penugasan, 7) Izin Pengangkutan dan Penjualan, 8) Izin Usaha Jasa pertambangan, dan 9) IUP untuk Penjualan.

Image by Freepik

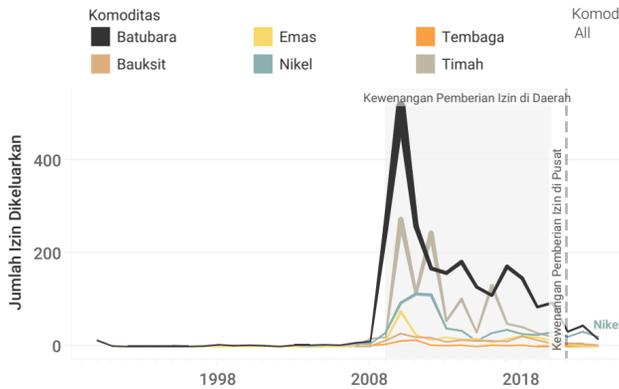
## Ringkasan Perizinan Nasional



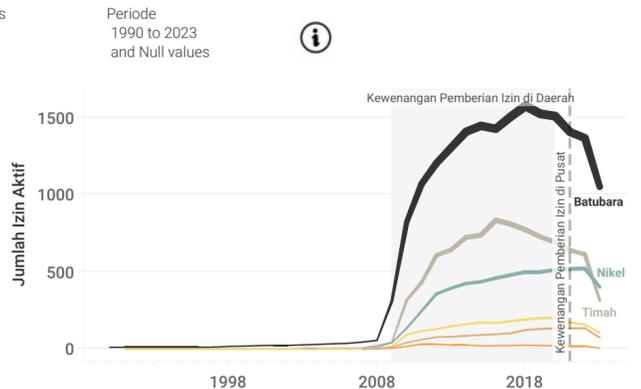
Catatan: Data per Mei 2024 (Sumber: Ditjen Minerba, 2024)

## 01 | Tren Perizinan Pertambangan Operasi Produksi

Tren perizinan kegiatan operasi produksi yang dikeluarkan menunjukkan peningkatan drastis setelah terbitnya UU Minerba pada tahun 2009 yang mengubah skema perizinan pertambangan dari skema kontrak menjadi skema perizinan. UU Minerba Tahun 2009 memberikan kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah sehingga berdampak pada kenaikan izin pertambangan. Revisi UU Minerba pada tahun 2020 yang menarik kewenangan pemberian izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat menunjukkan upaya pemerintah dalam pengendalian perizinan pertambangan di Indonesia. Hal ini terlihat pada grafik bahwa terjadi penurunan dalam pemberian izin pertambangan yang berdampak pada penurunan jumlah izin aktif pada 4 tahun terakhir.

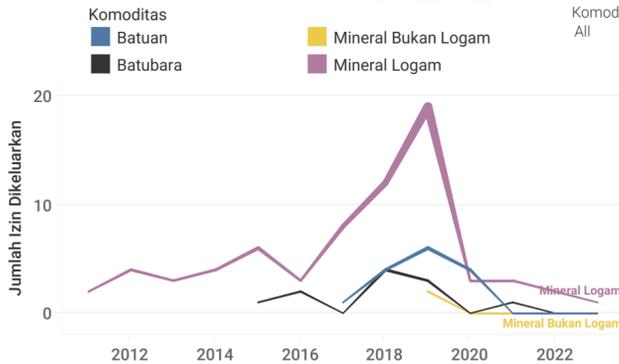


Tren Jumlah Izin Dikeluarkan kegiatan Operasi Produksi dengan komoditas All pada tahun (1990 to 2023). Jenis izin yang dianalisis adalah KK, PKP2B, IUP, dan IUPK.

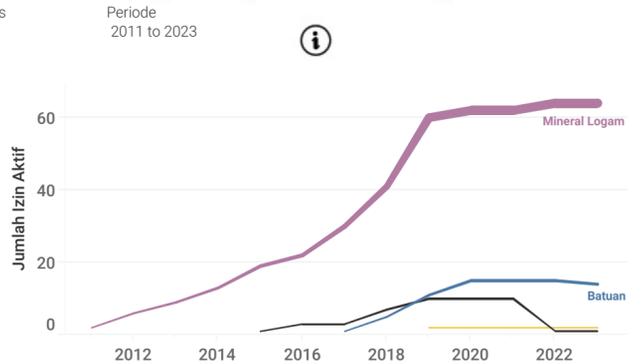


Tren Jumlah Izin Aktif kegiatan Operasi Produksi dengan komoditas All tahun (1990 to 2023). Jenis izin yang dianalisis adalah KK, PKP2B, IUP, dan IUPK.

Komoditas batubara menjadi komoditas dengan jumlah izin aktif dan dikeluarkan paling banyak, disusul dengan komoditas timah dan nikel dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan komoditas batubara memiliki cadangan yang melimpah, selain itu permintaan pasar domestik dan internasional untuk kebutuhan energi ketenagalistrikan yang masih didominasi oleh PLTU berbasis energi fosil dalam dua dekade terakhir. Isu transisi energi dan dekarbonisasi yang berkaitan dengan meningkatnya permintaan terhadap mineral kritis selama lima tahun terakhir tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah izin pertambangan operasi produksi komoditas bauksit, emas, nikel, tembaga, dan timah di Indonesia. Namun jika dilihat berdasarkan jumlah izin pertambangan operasi produksi khusus dengan tahapan kegiatan pengolahan-pemurnian, komoditas mineral logam memiliki jumlah izin aktif dan izin dikeluarkan paling banyak dari tahun ke tahun dibandingkan dengan komoditas lainnya.



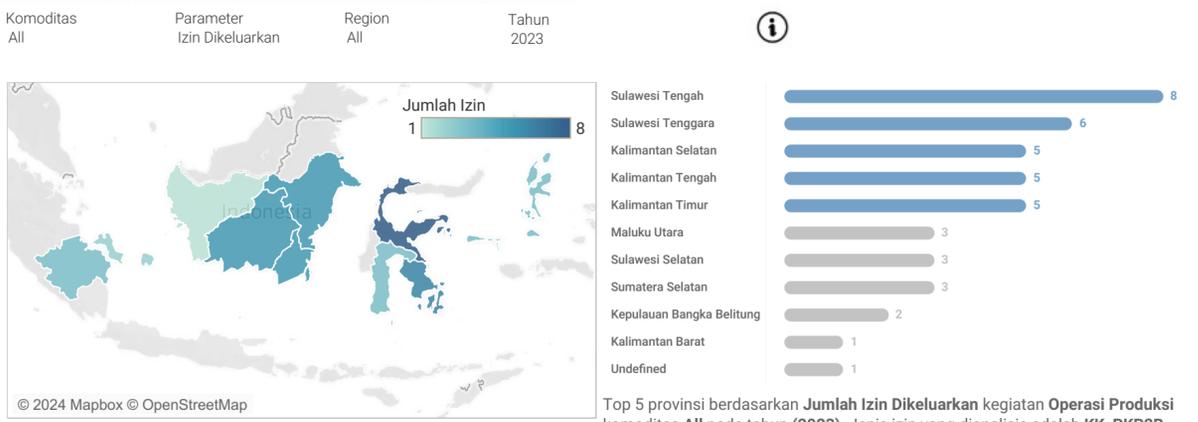
Tren Jumlah Izin Dikeluarkan kegiatan Operasi Produksi Khusus Pengolahan-Pemurnian dengan komoditas All pada tahun (2011 to 2023). Jenis izin yang dianalisis adalah IUP-OPK.



Tren Jumlah Izin Aktif kegiatan Operasi Produksi Khusus Pengolahan-Pemurnian dengan komoditas All pada tahun (2011 to 2023). Jenis izin yang dianalisis adalah IUP-OPK.

## 02 | Distribusi Perizinan Pertambangan Operasi Produksi

Distribusi perizinan pertambangan secara spasial dari tahun ke tahun menunjukkan konsentrasi pemberian izin dan jumlah izin aktif terletak di region Kalimantan khususnya komoditas batubara. Hal ini berkaitan dengan karakteristik sumber daya alam masing-masing wilayah yang menunjukkan potensi komoditas tertentu. Sebagai contoh, komoditas timah berpusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian sebaran nikel, tembaga, dan emas berpusat di region Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua. Berdasarkan tren lima tahun terakhir, jumlah izin pertambangan yang dikeluarkan dan izin aktif berpusat pada region Kalimantan, region Sulawesi, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



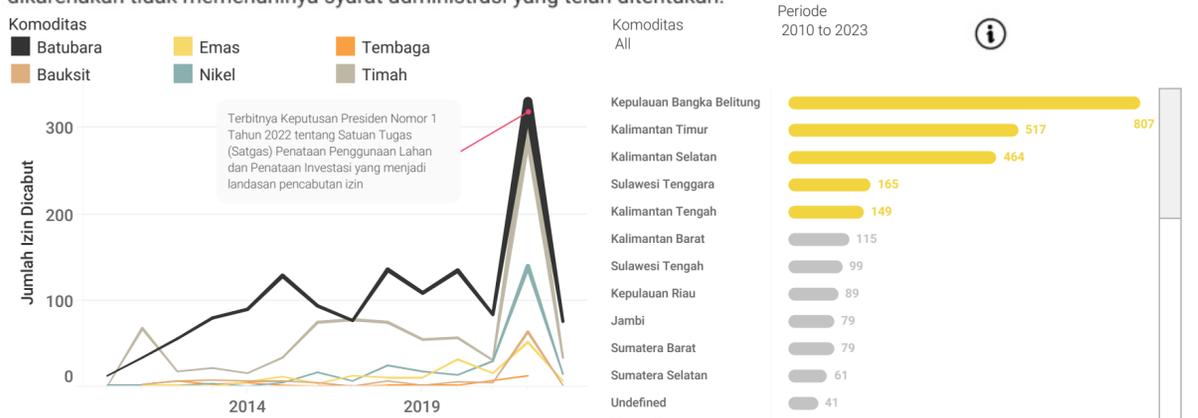
Sebaran Jumlah Izin Dikeluarkan kegiatan Operasi Produksi dengan komoditas All pada tahun (2023). Jenis izin yang dianalisis adalah KK, PKP2B, IUP, dan IUPK.

Top 5 provinsi berdasarkan Jumlah Izin Dikeluarkan kegiatan Operasi Produksi komoditas All pada tahun (2023). Jenis izin yang dianalisis adalah KK, PKP2B, IUP, dan IUPK.

## 03 | Pencabutan Perizinan Pertambangan Operasi Produksi

Pencabutan perizinan pertambangan dapat dilakukan jika izin yang diberikan telah habis masa berlakunya, tidak memenuhi syarat administrasi dan finansial, dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jika dilihat dari tren, izin pertambangan operasi produksi komoditas batubara menjadi jumlah izin yang paling banyak dicabut, disusul dengan komoditas timah dari tahun ke tahun. Hal ini berkaitan dengan banyaknya jumlah izin pada ketiga komoditas tersebut jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Sebaran pencabutan perizinan secara region juga memiliki pola yang sama dengan persebaran wilayah yang memiliki jumlah izin yang banyak, yaitu region Kalimantan, region Sulawesi, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kenaikan drastis terjadi pada tahun 2022 dikarenakan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang memiliki salah satu tugas utamanya adalah pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Pencabutan izin pertambangan tersebut dikarenakan tidak memenuhinya syarat administrasi yang telah ditentukan.



Tren Jumlah Izin yang Dicabut kegiatan Operasi Produksi dengan komoditas All pada tahun (2010 to 2023). Jenis izin yang dianalisis adalah KK, PKP2B, IUP, dan IUPK.

Top 5 provinsi berdasarkan Jumlah Izin yang Dicabut kegiatan Operasi Produksi komoditas All pada tahun terpilih. Jenis izin yang dianalisis adalah KK, PKP2B, IUP, dan IUPK.